KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Di sektor industri 2026: waspada, gelombang PHK bisa terjadi lagi
Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Di Sektor Industri 2026

Waspada, Gelombang PHK Bisa Terjadi Lagi

ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti gelombang PHK sepanjang 2025 di tengah pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen. Lemahnya daya beli dan stagnasi sektor industri dikhawatirkan memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja hingga 2026.

Situasi itu merupakan gambaran nyata adanya tekanan ekonomi, baik yang dirasakan pekerja maupun pelaku usaha. "Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PHK, disusul perdagangan dan pertambangan," ujar Edy dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, kondisi itu tidak terlepas dari kebijakan perdagangan yang belum sepenuhnya berpihak pada industri dalam negeri, khususnya sektor padat karya. Produk tekstil, alas kaki, dan manufaktur lokal semakin terdesak produk impor yang lebih murah dan cepat diserap pasar.

Selain itu, penurunan upah riil buruh sejak 2018 hingga 2024, sebagaimana dicatat Bank Dunia, mempersempit ruang konsumsi rumah tangga. Itu juga tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 yang hanya mencapai 4,89 persen.

"Daya beli yang melemah menekan konsumsi, menurunkan produksi, dan berujung pada PHK lanjutan. Jika tidak ada koreksi kebijakan, situasi ini bisa berlanjut hingga 2026," ujar legislator PDIP itu.

Dia juga menyoroti tingginya biaya produksi yang membuat struktur biaya industri nasional tidak kompetitif. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan mempersempit penciptaan lapangan kerja baru, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah setiap tahun.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menambahkan, Pemerintah harus melakukan langkah pencegahan PHK, khususnya di sektor tekstil yang dinilai strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Koordinasi antar kementerian jadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi pekerja.

"Industri tekstil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, upaya pencegahan PHK perlu jadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal," ujar politikus Fraksi PKS itu.

Dia bilang, berbagai insentif yang telah disiapkan Pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan. Namun, hal itu perlu dibarengi pengawasan ketat serta dukungan konkret bagi industri, karena penanganan pasca-PHK jauh lebih berat dibandingkan upaya pencegahan sejak awal.

Skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sudah disiapkan negara, tapi akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, pencegahan harus menjadi fokus utama," ingatnya. ■ PYB